



kronik perjuangan petani takalar



Redaksjoner

Panjang umur gerakan otonom anti-hirarki di seluruh dunia!

RENTANGAN PERJUANGAN SELAMA 27 TAHUN

Di Polongbangkeng Utara dan Selatan, Kabupaten Takalar Sulawesi Selatan, sekitar 50 km dari Makassar. Selama lebih dari 27 tahun tanah petani dirampas untuk dijadikan ditanami tebu oleh Pabrik Gula PTPN XIV (persero).

Awal Mula Perampasan

Dibentuk berdasarkan PP No. 19/1996, PT. Perkebunan Nusantara XIV (PTPN XIV) adalah satu dari sekian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang agribisnis. PTPN XIV merupakan penggabungan kebun-kebun proyek pengembangan PTP di Sulawesi, Maluku dan NTT yaitu eks PTP VII, PTP XXVIII , PTP XXXII dan PT Bina Mulia Ternak (BMT). PTPN XIV memiliki 18 unit perkebunan dan 25 unit pabrik pengolahan dengan komoditi kelapa sawit, gula , karet, kakao, kelapa hibrida, kelapa Nias, pala, kopi pada areal konsesi seluas 55.425,25 ha.

Khusus komoditi gula PTPN XIV kini mengelola tiga pabrik gula yaitu PG Camming dan PG Arosoe di Kabupaten Bone dan PG Takalar di Kabupaten Takalar dengan total areal seluas 14.312 ha. Dalam setahun, ketiga pabrik ini memproduksi 36.000 ton atau memasok 1,33 % konsumsi gula nasional yang mencapai 2, 7 juta ton.

PG Takalar PTPN XIV beroperasi di Polong-bangkeng sejak tahun 1982. Sebelumnya beroperasi dengan nama PTP XXIV-XXV. PG Takalar PTPN XIV adalah peralihan dari PT Madu Baru, yaitu sebuah perusahaan pabrik gula milik Sultan Hamengkubuwono yang sebelumnya telah berdiri dan membebaskan sebagian tanah petani sejak tahun 1978. Namun



Dalam sebuah tatanan yang diorganisir berdasarkan relasi kapital, peristiwa demi peristiwa yang serupa dengan yang terjadi di Polongbangkeng, terjadi tiap detiknya di berbagai tempat. Siapapun yang paham bagaimana kapital bekerja niscaya akan melihat bagaimana ia beroperasi hanya dengan cara yang memungkinkannya eksis : mengeksploitas!

Seseorang yang meragukan bahwa kejadian ini memiliki relasi kuat dengan konstruksi ekonomi dan konfigurasi mutakhir kapitalisme, mesti memeriksa kembali kejadian yang telah dan tengah berlangsung secara menyeluruh. Apa yang terjadi di Polongbangkeng, Takalar bukanlah sebuah kejadian begitu saja tanpa rentangan picu dan konstruksi historis. Ia merepresentasikan bagaimana konflik kelas terorganisir dari skala global hingga lokal, dari zaman kolonial hingga era forex. Tulisan ini menganalisa bagaimana kecenderungan produksi dan konsumsi dalam dunia komoditas mengkreasikan malapetaka.

Lansekap Bisnis Gula Dunia

“Meskipun berada dalam harga relatif tinggi, permintaan gula saat ini masih sekitar 70%. Tidak banyak hal dalam hidup yang berada dalam 70%. Gula memiliki masa depan luar biasa” [Jim Rogers - Rogers Holding]

Harga gula dunia saat ini yang mencuat hingga 88 % berada dalam posisi tertingginya dalam 28 tahun terakhir. Laporan Food Outlook FAO 2009 menyebutkan bahwa pergerakan harga dalam setahun menunjukkan trend meningkat. Meskipun begitu, analis pasar menyatakan ini sesungguhnya adalah posisi stagnan. Pasar gula dunia masih dihantui titik kritis, demikian kesimpulan stasiun televisi Bloomberg.

Kisaran tersebut diklaim sebagai posisi yang konsisten dalam beberapa tahun terakhir. Itulah mengapa pelaku bisnis gula masih yakin bahwa bisnis gula masih manis dan menggairkan.

Saat ini produksi gula dunia mencapai 158, 5 juta ton, menurut cukup tajam hingga 5,4 %. Sementara tingkat konsumsi

pada tahun 1980 PT Madu Baru mundur dari rencana pengolahan perkebunan tebu setelah terjerat kasus penyelewengan dana pembebasan tanah, sehingga digantikan oleh PTPN XIV berdasarkan SK Bupati Takalar tahun 1980.

Penolakan yang dijawab dengan Represi kejam

Reaksi petani atas pembangunan pabrik telah menunjukkan penolakan sejak PT Madu Baru berdiri. Tidak adanya sosialisasi dan keterlibatan masyarakat oleh dikeluarkannya izin sepihak pembangunan pabrik serta penetapan ganti rugi yang sangat tak sebanding yaitu Rp. 10/m2, adalah alasan penolakan petani. Bahkan pembebasan lahan berjalan penuh dengan manipulasi dan intimidasi. Serangkaian ancaman dan tindakan kekejaman dilakukan aparat TNI. Pengrusakan dan pengambilan tanah secara paksa, pemukulan, penangkapan atas tuduhan kriminal, penembakan, bahkan pembunuhan. Sebagai contoh, pada November 1978 Lewa Dg. Rowa seorang petani ditemukan tewas dengan kaki tergantung, kasusnya tak pernah diusut hingga hari ini.

Setelah peralihan PT Madu Baru kepada PTPN XIV, intimidasi masih terus berlanjut untuk mempercepat penguasaan lahan petani. Bahkan diperparah dengan mencap warga yang menolak pembebasan lahan sebagai PKI. Adalah makar bagi setiap tindakan yang tak sejalan atas kebijakan pemerintah. Ini adalah pola standar di masa itu yang digunakan negara untuk mematahkan perlawanan.

“Karaeng” atau golongan keturunan bangsawan turut berperan dalam upaya pembebasan lahan. Di tengah masyarakat,



kelompok ini memiliki posisi dan wewenang lebih tinggi bahkan menempati jabatan dalam struktur pemerintahan. Selain informan, mereka juga mengelabui dan merepresi setiap bentuk penolakan petani.

Atas SK Bupati Takalar tahun 1980, izin HGU diterbitkan selama 25 tahun bagi beroperasinya Pabrik gula PTPN XIV. Ditipu oleh status tanah dan jani bahwa tanah petani akan kembali setelah masa HGU berakhir membuat warga terpaksa menandatangani perjanjian dan menerima pembayaran ganti rugi atas tanah. Ditambah posisi warga yang tersudutkan oleh intimidasi. Meski begitu, sejumlah petani tak sedikitpun pernah mendapatkan ganti rugi.

Lebih dari 6500 m² lahan dikuasai pabrik gula PTPN XIV, 4000 m² lahan tersebar di 12 Desa di dua kecamatan yaitu Polongbangkeng Utara dan Polongbangkeng Selatan Kab. Takalar 2500 m² lahan tersebar di Gowa dan Jeneponto. Penguasaan lahan secara besar-besaran oleh korporasi negara ini adalah penghilangan sumber kehidupan petani.

Kebangkitan Petani

Penantian selama bertahun-tahun tak mampu membendung keterpurukan dan kebutuhan hidup yang semakin mendesak. Perlawanan petani merebut kembali tanahnya akhirnya mulai dilakukan.

Tahun 1999, pendudukan lahan bermula, secara individu petani mulai melakukan aksi langsung pengambilan tanahnya. Menduduki lahan, mengolah dan menggati tebu dengan tanaman yang lebih produktif (ubi kayu, jagung, palawija) terjadi di beberapa areal perkebunan .

Tahun 2005, status HGU PTPN XIV seharusnya berakhir tetapi PTPN XIV terus melakukan aktivitasnya seolah-olah HGU tak punya batas waktu. Petani pun terus melakukan pengambilalihan lahan, petani di desa lainnya juga melakukan hal sama. Reclaiming meluas, diperkuat keyakinan bahwa status tanah telah kembali karena masa HGU telah berakhir.

Tahun 2007, dua tahun lewat dari batas HGU, tetap tak ada kejelasan atas pengembalian tanah petani. Reclaiming makin meluas dan dilakukan secara massal hampir di seluruh desa di Kec. Polongbangkeng. Pembakaran lahan, pendudukan dan pematokan areal perkebunan, pengalihan fungsi lahan menjadi menjadi persawahan, ternak dilepaskan di perkebunan tebu, serta kegagalan pembibitan lahan tebu adalah sejumlah aksi langsung yang sangat signifikan mengambil kembali tanah pertanian.

Tahun 2008, akibat aksi reclaiming petani ini telah mengancam aktivitas PTPN XIV, sehingga satuan Brimob terus diturunkan melakukan penjagaan di sekitar lokasi. Warga menjalankan taktik jenius, melepaskan ternak sapi mereka ke areal perkebunan tebu. Ini dimaksudkan sebagai upaya merebut kembali tanah tersebut, sekaligus mensabotase tanaman ilegal yang ditanam PTPN di tanah mereka. Brimob yang terlatih tersebut terus disiajakan menghalau aksi petani. Dalam sebuah aksi protes, petani dihadap oleh pasukan bersenjata lengkap. Insiden penembakan pun meletus. Insiden ini melukai 4 orang petani. Konflik petani dan PTPN XIV kembali terangkat dan menjadi sorotan. Resistensi warga semakin meningkat apalagi setelah Bupati Takalar secara sepihak kembali menerbitkan sertifikat HGU PG Takalar berlaku sampai 2024.

Tahun 2009, sepanjang tahun dan hampir setiap harinya, petani Polongbangkeng mempertahankan lahan mereka. Sepanjang itu pula mereka mendapatkan tekanan aparat yang terus disiajakan

PTPN XIV. Penembakan kembali terjadi hanya dalam kurun waktu tidak sampai setahun. Pada 9 agustus 2009, sebuah aksi protes yang dimaksudkan petani untuk mencegah traktor milik PTPN XIV mengolah lahan mereka, dihalau secara brutal oleh aparat Negara. Satuan polisi dari Polresta Takalar, bersama 2 SSK Brimob dan PHH membabi buta melemparkan gas air mata dan tembakan pada kerumunan petani yang berkumpul. Setidaknya 8 orang petani tertembak, satu di antaranya mengalami luka serius di kepala karena ditembak dari jarak dekat, sementara sebagian besar lainnya juga mengalami luka-luka. Dari kejadian tersebut 7 petani ditangkap di lokasi kejadian.

Pasca kejadian ini, polisi terus melakukan penyisiran dan intimidasi ke rumah-rumah warga. Intimidasi lewat jalur hukum, mengkriminalkan petani, berbagai taktik digunakan PTPN XIV dalam memperlemah perjuangan Petani.

Upaya-upaya melemahkan Perjuangan Petani

Terdesak dengan aksi petani yang tak kunjung mereda, dimana mengancam kegagalan obsesi swasembada gula yang diprogramkan, akhirnya membuat pemerintah, PTPN dan polisi mendorong upaya diplomasi dan pendekatan kepada sejumlah warga secara terbatas. Wakil Gubernur Agus Arifin Numang turun langsung ke Takalar untuk bertemu dengan petani. Tetapi ini sekali lagi tak melibatkan petani secara keseluruhan, dan pada akhirnya ber-buah solusi sepihak yang tidak didukung oleh sebagian besar petani.

Keputusan pertemuan yakni Program Tebu Rakyat (TR) tak ubahnya sebagai sogokan agar petani melupakan siapa sebenarnya pemilik tanah dan siapa yang merampoknya. Mereka dijanjikan sekian luasan tanah untuk digarap dengan status hak kelola perkebunan tebu. Bukannya mengembalikan tanah petani, corak kapitalistik yang kental dalam program tersebut menjadikan petani hanya dijadikan buruh untuk menyuplai bahan baku produksi. Sebuah pembodohan dan manipulasi sejarah tanah, yang untungnya tidak disepakati oleh mayoritas petani.

empat PG yang berada di wilayah timur Indonesia, yaitu tiga di Sulawesi Selatan dan satu di Gorontalo. Sementara itu, dari delapan pabrik gula rafinasi, hanya satu yang terdapat di kawasan ini.

Akan tetapi, para borjuasi lokal tidak dapat serta merta menguasai pasar ini. Mereka harus bersaing dengan borjuasi nasional yang memiliki Lampung dan Jawa, sebagai produsen utama gula Indonesia. Belum lagi borjuasi internasional, yang memasok gula impor ke pasar domestik. Singkatnya, untuk memperebutkan KTI, ada sebuah persaingan yang diatur oleh negara sebagai mediator pasar.

Pilar proyek yang diandalkan untuk ambisi surplus gula Pemprov Sulsel adalah PT. Perkebunan Nusantara XIV, BUMN yang mengendalikan dan mensupervisi tiga pabrik gula di Sulawesi Selatan tersebut. Namun, ketiga pabrik tersebut sangat rapuh untuk diandalkan mendominasi pasar KTI. Persoalannya klasik: selain lahan yang telah terbatas, mesin-mesin yang ada sudah sangat tua dan hanya mampu berproduksi di bawah target normal. Beberapa tahun silam bahkan para pengusaha gula lokal mendesak agar Pabrik Gula yang ada dibawah PTPN XIV diprivatisasi, untuk mendorong efisiensi dan produktifitasnya.

Namun masalahnya tidak sampai disitu, tebu yang dimiliki PTPN XIV telah sampai pada generasi ketujuh. Usia yang tidak efektif lagi dalam menghasilkan tebu dengan rendeman (kadar gula) normal. Belum lagi liberalisasi pertanian, dimana kapitalis Indonesia mesti bersaing dengan komoditi dari luar Indonesia yang berbiaya produksi rendah dengan tarif masuk yang hampir nihil.

Tahun 2009, PT. Makassar Te'ne sebuah pabrik gula rafinasi dibangun untuk mengiringi industri makanan dan minuman yang marak membuka pabrik di kawasan ini. Guna kepentingan pasar, Pemprov Sulsel memfasilitasi PT. Makassar Te'ne bersinergi dengan PTPN XIV agar keduanya berbagi pasar. PTPN XIV memasok gula mentah dan PT. Makassar Te'ne mengolahnya menjadi gula rafinasi, untuk disuplai ke industri.

Karena kondisi yang ada dinilai menyulitkan untuk mencapai target ambisius swasembada gula di tahun 2010, maka dilakukanlah langkah-langkah strategis. Pertama-tama, melakukan revitalisasi dan pemerajahan pabrik gula. Kredit 400 milyar dari BRI dikucurkan ke PTPN XIV untuk mendorong efisiensi dan percepatan kapasitas produksi. Mesin-mesin dan komponen produksi lainnya diganti dan diperbaiki. Tanaman tebu diperbaharui untuk mengejar panen. Tetapi justru disinilah kendalanya, lahan yang ada tidak mencukupi bila dibandingkan dengan target produksi.

Sambil mengupayakan perluasan lahan baru, alternatif paling efisien dan memungkinkan bagi PTPN dan pemprov adalah mempertahankan lahan lama. Lahan yang dulunya diambil secara paksa dari warga, lantas diberi status Hak Guna Usaha.

Adu domba dan politik pecah belah terus dilancarkan, yang menyulut konflik horizontal akibat dominasi beberapa elit-elit masyarakat yang tergabung dalam sebuah tim perwakilan dari seluruh desa, justru beralih menjadi musuh yang mengambil keuntungan dalam program tersebut.

Di bulan Agustus 2009, diplomasi kembali digagas. Kali ini giliran polisi yang maju. Kapolda Sulselbar Mathius Salempang yang langsung turun tangan. Tapi, seperti sejarah selalu mengajarkan, diplomasi takkan pernah memenangkan kaum yang ditindas. Perjuangan petani kini dibelokkan dengan cara mendudukkan mereka pada hukum formal, sebuah tempat yang tidak pernah menyediakan tempat bersahabat bagi petani.

Epilog

Keberadaan Pabrik Gula PTPN XIV hampir 30 tahun telah secara drastis mengubah kehidupan petani Polongbangkeng. Akan tetapi, saat mereka menjadi tumbal atas ambisi tak kenal batas, petani Polongbangkeng telah memahami siapa musuh mereka dan bagaimana sistem ini berjalan. Mereka mengajarkan bagaimana berjuang dengan sepenuh hati. Mereka menunjukkan bahwa hanya dengan ‘aksi langsung’, dan bukan berunding atau memohon belas kasihan pejabat, kehidupan mereka bisa berubah. Mereka membuktikannya saat menduduki lahan-lahan secara sepihak, menanaminya langsung, panen padi dan jagung dirasakan kembali setelah hilang selama 27 tahun.

Dalam situasi terakhir, petani terus dihantui teror negara terkait kriminalisasi karena menuntut hak. Penggebrekan, intimidasi, pengawasan, penjemputan paksa, interogasi, penahanan, dan tindakan lainnya terus menerus dilancarkan. Ini adalah upaya sistematis untuk melihat perjuangan petani hancur lebur. Tetapi kita semua tahu, mereka tak mungkin bertahan hingga hampir 30 tahun di bawah tindakan-tindakan dan intimidasi kejam jika tak ada semangat hidup yang terus menyala di dada mereka. Semangat hidup yang berarti bersiap untuk mati, sebagaimana yang mereka sering serukan!

TABIR GILA DUNIA GULA

ANALISA MENGENAI INDUSTRI GULA & PERAMPASAN TANAH PETANI POLONGBANGKENG, TAKALAR

cenderung stabil pada perkiraan 162,2 juta ton. Selisihnya cukup signifikan untuk mengganggu harga pasaran, mencapai 3 4,7 juta ton. Mengapa produksi gula dunia menurun?

Ada dua hal yang menyebabkannya. Pertama, rusaknya lahan tebu dan terjadinya gagal panen di beberapa produsen gula utama seperti Brazil dan India. Perubahan iklim telah mengganggu fase tanam dan hujan. Akibatnya, petani lebih memilih menanam tanaman lain yang lebih menguntungkan ketimbang tebu yang sangat beresiko untuk saat ini. Dengan begitu mengurangi produksi gula akibat menurunnya suplai bahan baku. Tentu saja hal ini mempengaruhi industri gula. Sebagai gambaran, India yang dulunya produsen terbesar kedua kini mesti mengimpor 6 juta ton untuk menutupi penurunan produksi domestik 41%.

Penyebab kedua, industri gula tidak lagi diolah hanya menjadi gula dalam bentuk tradisional (kristal/hablur). Dalam dua dekade terakhir, terdapat berbagai komoditi diciptakan dari industri berbasis tebu. Namun dari semua jenis tersebut ada dua komoditi yang menjadi trend industri dan signifikan mempengaruhi produksi dan stok gula dunia. Yakni diolah untuk dijadikan gula rafinasi, gula untuk industri makanan dan minuman kemasan, dan diolah untuk dijadikan etanol sebagai bahan bakar nabati. Sebagai gambaran situasi tersebut, Brazil produsen gula utama di dunia telah mengkonversi industri gulanya ke etanol sampai 30%. Seiring semakin besarnya transformasi ke produksi etanol, harga gula di pasar global menurut perkiraan pengamat akan terus melonjak hingga 2014.

Defisit produksi ini telah menyebabkan ketidakstabilan harga. Jelas ini adalah konsekuensi logis bilamana tata produksi, distribusi dan konsumsi didikte berdasarkan hukum penawaran dan permintaan. Tetapi bagi kapital, selama permintaan masih tinggi, defisit produksi juga bermakna peluang besar. Artinya, yang harus dilakukan adalah menambah kapasitas produksi yang bisa menutupi pasar gula yang sebelumnya bolong karena dialihkan ke komoditi baru.

Gula di bawah Indonesia Inc.

"Biarkan harga gula mengikuti mekanisme pasar, lagi pula tidak ada keluhan dari konsumen", [Menteri Pertanian Anton Apriantono]

Industri gula adalah avant garde bagi industri Indonesia. Ia

Hal inilah yang menjelaskan mengapa di tahun 2007, HGU tak kunjung usai dan tanah tak kunjung dikembalikan. Malah PTPN XIV memperpanjang secara sepihak HGU di area pengelolaan PG Takalar. Ini adalah logika paling purba dari praktek-praktek kapital.

Oto-Kritik Tanpa Titik Balik

Sejak meletusnya aksi protes petani yang dihadap dengan meletusnya pula senapan Brimob, begitu banyak komentar yang mengarah pada aksi-aksi langsung yang dilakukan petani maupun permasalahan pergulaan nasional. Akan tetapi, kejadian ini gagal dianalisa sebagai sirene akan kegilaan industri.

Kapital telah men-direct pola konsumsi massal yang berujung pada malapetaka. Bagi mereka, kebutuhan manusia dapat selalu didiversifikasikan dengan menamakannya peluang ekonomi. Ini jelas bukan lelucon yang lucu, jika melihat bagaimana lahan-lahan produktif bagi sumber pangan kini dikonversi menjadi areal untuk tanaman yang akan diolah menjadi bahan bakar nabati atau bahan baku industri yang tidak dibutuhkan manusia dan alam. Para korporat bersorak atas inovasi bahan bakar alternatif semenjak krisis energi menghantui kapitalisme. Tetapi semua orang harus menanggung akibat dari berkurangnya akses terhadap pangan akibat konversi lahan dan industrialisasi.

Bagi kami, sebuah analisa haruslah sekaligus kritik itu sendiri. Para pemerhati ekonomi-kerakyatan, aktifis petani, aktifis pekerja, aktifis lingkungan hidup, gagal melihat bagaimana kapital beroperasi melampaui logikanya sendiri. Perampasan tanah, pengharicruran sumber-sumber kehidupan masyarakat dan kerusakan lingkungan adalah keniscayaan, sekali lagi, jika ekonomi ditata dalam logika kapital. Dan hal tersebut tidak bisa diselesaikan dengan nasionalisasi, industrialisasi, atau omong kosong swasembada dan ketersediaan stok dalam negeri. Ia tidak bisa dikendalikan dengan memberikan kendali pada segelintir orang bernama pemerintah. Ia tidak bisa dibuat berpihak hanya dengan menaikkan upah. Sebuah kritik permanen harus berangkat dari sebuah titik yang tidak memungkinkannya kembali lagi pada titik tersebut.

Pada akhirnya petani Takalar memang benar! Dengan membakar lahan tebu, merusak traktor, menghadang dan menghalangi proses produksi, mereka telah membuktikan bahwa satu-satunya cara efektif yang bisa menghentikan kegilaan industri dan kapital hanyalah dengan cara yang telah dipakai kelas pekerja sejak awal kemunculan industri : **sabotase!**